



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: UU Penyelenggaraan haji& Umrah sudah disahkan, aturan melegakan umrah mandiri menuai perdebatan panjang
Tanggal	: Senin, 27 Oktober 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

UU Penyelenggaraan Haji & Umrah Sudah Disahkan

Aturan Melegalkan Umrah Mandiri Menuai Perdebatan Panjang

PEMERINTAH dan DPR sudah mengesahkan Undang-undang Nomer 14 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 4 September 2025.

UU yang baru seumur jagung itu menjadi perdebatan publik karena melegalkan umrah secara mandiri. Lebih tepatnya pada Pasal 86 ayat 1 huruf b menyatakan perjalanan ibadah umrah bisa dilakukan secara mandiri.

Padahal sebelumnya umrah hanya bisa dilakukan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan keputusan melegalkan umrah mandiri, karena selama ini banyak jamaah dari seluruh dunia termasuk Indonesia

sudah melakukan umrah mandiri. Selain itu, otoritas Arab Saudi juga memberikan peluang pelaksanaan umrah mandiri.

Karenanya, Pemerintah pun memasukkan ketentuan umrah mandiri di UU 14 tahun 2025 dengan tujuan melindungi jemaah asal Indonesia.

"Kita ingin melindungi seluruh jamaah umrah mandiri atau seluruh jamaah umrah kita, maka kita masukkanlah di dalam Undang-Undang untuk memastikan perlindungan terhadap jamaah umrah mandiri," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Minggu (26/10).

Lebih lanjutnya, ia mengatakan ketika jamaah umrah mandiri dilegalkan dalam Undang-Undang, maka saat jamaah berangkat, pemerintah akan mengambil

tanggung jawab dalam perlindungannya.

Kebijakan melegalkan umrah mandiri diperlukan oleh berbagai travel umrah. Salah satunya Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (DPP AMPHURI), Zaky Zakaria Anshary.

"Jika legalisasi umrah mandiri diterapkan tanpa pembatasan, akan terjadi efek domino termasuk ribuan PPIU gulung tikar dan jutaan karyawan kehilangan pekerjaan," ujar Zaky seperti dilansir tempo.

Selain itu, ada dampak lain jika kebijakan umrah mandiri diterapkan, yakni para jemaah yang melakukan umrah mandiri berpotensi untuk tidak mendapat pembinaan manasik, bimbingan

fikih hingga perlindungan hukum ketika berada di Tanah Suci.

Sekjen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPIH), Bambang Irianto mengaku ada kegelisahan dari para pengusaha travel atas kebijakan umrah mandiri. "Para travel para terik semua," ujar dia.

Namun, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri menerangkan jika kebijakan melegalkan umrah mandiri demi melindungi masyarakat. Karena praktik umrah mandiri sudah berjalan cukup lama.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Abidin Fikri dan Bambang Irianto terkait kebijakan melegalkan umrah mandiri, berikut wawancaranya.

BAMBANG IRIANTO
Sekjen Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia

Pengusaha Travel
Terancam Bangkrut



99
Kemungkinan
masalah yang
akan terjadi adalah
sangat minim
perlindungan
terhadap jamaah
umrah yang
melakukan secara
mandiri.

APA pendapat Anda terkait dengan sikap Pemerintah yang melegalkan umrah secara mandiri?

Undang-Undang No 14 tahun 2025 yang baru saja disahkan, sebenarnya bukanlah keputusan Pemerintah dan DPR, maka secara hukum kita menghormati apa pun keputusan yang sudah dibuat.

Untuk kegiatan umrah secara mandiri memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.

Apakah ada masalah?

Kemungkinan masalah yang akan terjadi adalah sangat minim, perlin-

dungan terhadap jemaah umrah yang

melakukan secara mandiri.

Selain itu, salah satu yang sulit

adalah mengontrol jamaah yang

datang secara mandiri.

Bagaimana dengan kebijakan

para pengusaha travel?

Saat ini, para pengusaha travel haji

dan umrah pada terik semasa, karena

usaha mereka terancam bangkrut

dengan adanya kebijakan umrah

secara mandiri ini.

Bangkrut kenapa?

Karena jualan travel umrah dan

haji tidak laku lagi jika ada umrah

Lalu, apa pendapat dan saran Anda dengan kebijakan umrah mandiri?

Pada prinsipnya, kebijakan melegalkan umrah secara mandiri ini baik. Namun, DPR dan Pemerintah harus membuat regulasi yang mengakomodir terhadap perlindungan jemaah yang menggelar umrah secara mandiri.

Karena sebenarnya sudah membolehkan, maka setiap orang boleh memilih. Mau umrah mandiri, boleh. Mau memakai travel juga boleh.

Silakan berpikir untuk memilih yang terbaik.

Kenapa Pemerintah Indonesia

SAAT ini lagi ramai mengena umrah secara mandiri telah dibolehkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No 14 tahun 2023. Bisa jadi ini bukanlah keputusan?

Bonus: Angsan dan kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi sudah membolehkan umrah secara mandiri.

Karena aturannya sudah membolehkan, maka setiap orang boleh memilih. Mau umrah mandiri, boleh.

Mau memakai travel juga boleh.

Silakan berpikir untuk memilih yang terbaik.

Tapi, beberapa travel protes

ngan aturan tersebut. Bagaimana?

Kita bukan menghambat travel, perusahaan travel di DPR hanya ingin memperbaiki pola pada aturannya.

Sama dengan ketika kita ingin

berangkat menggunakan kereta, kan

juga ikut membolehkan?

Pemerintah dan DPR ingin memfasilitasi dan memberikan payung hukum yang sah, karena pada praktiknya ketika kita berangkat ke luar negeri

selalu berjalan cukup lama, tapi belum

ada status hukumnya, makanya di UU

yang baru diatur soal umrah mandiri.

Tapi, beberapa travel protes

ngan aturan tersebut. Bagaimana?

Kita bukan menghambat travel, perusahaan travel di DPR hanya ingin memperbaiki pola pada aturannya.

Sama dengan ketika kita ingin

berangkat menggunakan kereta, kan

bisa booking tiket secara langsung, bisa melalui aplikasi dan lain sebagainya.

Pihak travel nantinya kharatir bahwa umrah mandiri lebih murah?

Kalau takut rugi ya jangan buat travel. Kalau ada anggapan umrah se

caro mandiri lebih murah belum tentu

juga. Semua itu tergantung dengan

keinginan individu sendiri.

Kalau berangkat menggunakan perusahaan travel, faktur biaya hingga 5

dan bukti faktur masih lama

nya justru bisa lebih mahal daripada menggunakan travel. ■ REN

ABIDIN FIKRI
Wakil Ketua Komisi VIII DPR

Ini Bukan Menghambat,
Tapi Memberi Pilihan



99
Kalau takut
rugi ya jangan
buat travel.
Kalau ada
anggapan
umrah secara
mandiri lebih
murah belum
tentu juga.

SAAT ini lagi ramai mengena

umrah secara mandiri telah dibolehkan

oleh Pemerintah berdasarkan UU No 14 tahun 2023. Bisa jadi ini bukanlah keputusan?

Bonus: Angsan dan kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi sudah membolehkan umrah secara mandiri.

Karena aturannya sudah membolehkan,

maka setiap orang boleh memilih.

Mau umrah mandiri, boleh.

Mau memakai travel juga boleh.

Silakan berpikir untuk memilih yang

terbaik.

Tapi, beberapa travel protes

ngan aturan tersebut. Bagaimana?

Kita bukan menghambat travel, perusahaan travel di DPR hanya ingin

memperbaiki pola pada aturannya.

Sama dengan ketika kita ingin

berangkat menggunakan kereta, kan